



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**TAHUN
ANGGARAN
2021**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RANHIR RENJA P)
DINAS PERHUBUNGAN**



OLEH:

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakan otonomi daerah; perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha; semakin meningkatnya kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber daya alam seperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di sektor transportasi di seluruh nusantara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala OPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja OPD serta keterkaitan visi, misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencanaan top down.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja OPD sebagai penjabaran Rencana Strategis OPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tenggarong, Juli 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara



H. Heldiansyah, SH., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660810 198902 1 003

DAFTAR ISI

	Hlm.
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN 2021	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja - PD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kab.	
Kutai Kartanegara	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	10
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 23
A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	23
B. Program dan Kegiatan	24
 BAB IV PENUTUP.....	 26

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020	8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	10
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	20
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara	21

BAB III

Tabel 3.1. Rumusan Kertas Kerja Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.....	24
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang dalam hal ini adalah dokumen perencanaan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021, yaitu sebagai tindak lanjut atau penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021, serta sebagai tindak lanjut atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021.

Rancangan Renja Perubahan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021, Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 serta pelaksanaan Renja tahun 2021 sampai dengan Triwulan ke II, untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, baik melalui hasil Musrenbang ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi serta Nasional maupun pengajuan langsung dari pihak masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa: Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD disusun berdasarkan:

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

3. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD.

Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud di atas adalah, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud di atas, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud di atas, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif sebagaimana dimaksud di atas, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud di atas, bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, didasari atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (Permendagri 86/2017, pasal 343) :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, Kerangka ekonomi Daerah, rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, RKPD dan Renja – PD Kutai Kartanegara 2021, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodasi hasil pengendalian dan evaluasi serta hasil audit laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 oleh BPK.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Renja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) tahun 2021 dimaksudkan untuk merencanakan dan memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan, dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan tahun 2021 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan Pemerintahan *GOOD GOVERNANCE* and *CLEAN GOVERNMENT* dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, yang sejalan dan sesuai kebutuhan.

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

Kemudian meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan yang semakin baik, penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai, serta meningkatkan keselamatan lalu lintas dan pelayanan transportasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan program Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2016-2021).

2. Tujuan

- a. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021.
- b. Menyiapkan tolak ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya.
- c. Membantu dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian Awal	: memuat Halaman Judul, Kata Pengantar, Keputusan Kepala OPD, dan Daftar Isi.
BAB I	: Bagian Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
BAB II	: Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
BAB III	: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan.
BAB VIII	: Penutup.

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
7. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun berjalan dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah 2021 dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Beberapa permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Angkutan Jalan

- 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
 - a) Masih belum tercapainya pelayanan sesuai dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - b) Belum adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara
 - c) Masih kurangnya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten
 - d) Minimnya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten
- 2) Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
 - a) Minimnya ketersediaan halte pada wilayah Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
 - b) Belum optimalnya fungsi Terminal angkutan umum yang ada
- 3) Fasilitas Perlengkapan Jalan
 - a) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten.
- 4) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a) Belum Terlaksananya Pelayanan melalui Mobil Uji Keliling dikarenakan adanya regulasi baru.
- 5) Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Angkutan Jalan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

- a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal
- b) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor
- c) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir
- d) Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
- 6) Keselamatan Angkutan Jalan
 - a) Belum adanya pengawasan mengenai standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten.
- b. Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau.
 - 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum optimalnya pengawasan terhadap kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari
 - b) Belum optimalnya pengawasan terhadap kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari
 - 2) Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum optimalnya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.
 - 3) Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum optimalnya monitoring mengenai pemenuhan standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau
- c. Pelayanan Angkutan Penyeberangan
 - 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum termonitornya ketersediaan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten
 - b) Belum termonitornya ketersediaan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten
 - 2) Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum optimalnya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran
 - 3) Keselamatan Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum optimalnya pengawasan mengenai pemenuhan standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten
 - 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

d. Pelayanan Angkutan Laut

1) Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

- a) Belum termonitornya mengenai ketersediaan kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan
- b) Belum termonitornya ketersediaan kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

2) Jaringan Prasarana Angkutan Laut

- a) Masih kurangnya ketersediaan dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

3) Keselamatan Angkutan Laut

Belum termonitornya mengenai pemenuhan standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten.

2.3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian SPM

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2016-2021, maka keterkaitan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu “melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan” adalah dalam menunjang pelaksanaan misi ke 5, yaitu: Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah.

Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diarahkan untuk pelaksanaan Misi ke-5 Kepala Daerah dan Wakil

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada RPJMD tahun 2016-2021, yaitu: Merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah, serta perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, laut, udara, sungai, danau dan penyebrangan, serta di bidang pengendalian dan operasional perhubungan.

Salah satu Program dan Kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2016-2021 yang diimplementasikan ke dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu: Program dan kebijakan dalam hal pembangunan dan pemerataan infrastruktur pelayanan publik, yang difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah, untuk pembangunan di bidang perhubungan mempunyai sasaran: “Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah Serta Kualitas Pelayanan Perhubungan”.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang akan ditempuh adalah dengan “Revitalisasi Layanan Transportasi Publik”, dengan arah kebijakan:

- 1) Pengembangan jasa layanan transportasi kota yang menghubungkan ke sentra pertanian, kawasan khusus, destinasi pariwisata, dan outlet perdagangan;
- 2) Pengembangan layanan transportasi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan khususnya yang berkaitan dengan transportasi public

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

Beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan pada Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah:

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

- 1) Luasnya Wilayah geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 18 Kecamatan;
- 2) Tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang memadai;
- 3) Besarnya Penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Kurangnya atau berkurangnya angkutan umum;
- 5) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampak tingginya penggunaan kendaraan pribadi
- 6) Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup besar dan adanya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;
- 7) Kurang optimalnya system perencanaan pembangunan di bidang perhubungan akan menjadi hambatan dalam pengusulan dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN bagi pembangunan sector transportasi di Kabupaten;
- 8) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas lalu lintas yang bisa mengakibatkan kondisi Lalu Lintas yang kurang aman, kurang nyaman, kurang tertib dan kurang terkendali sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- 9) Masih adanya temuan hasil pemeriksaan yang akan berpengaruh negatif bagi keberlangsungan organisasi;
- 10) Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 11) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
- 12) Masih adanya angkutan umum/ darat yang kurang layak atau menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan asap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih;

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

- 13) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan;
- 14) Kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai;
- 15) Kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kukar
- 16) Prasarana dan fasilitas perhubungan yang kurang responsif gender;
- 17) Semakin meningkatnya jumlah pariwisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga akan membutuhkan jasa transportasi yang memadai;
- 18) Perlunya ketersediaan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan;
- 19) Perlunya perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan yang responsif gender;
- 20) Perlunya revitalisasi terminal yang sudah ada;
- 21) Perlunya revitalisasi dermaga tersebar di Kukar;
- 22) Perlunya ketersediaan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kukar;
- 23) Perlu adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan skala Kabupaten;
- 24) Adanya kesamaan dalam upaya penanganan permasalahan Transportasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat;
- 25) Perlunya peningkatan pengelolaan perparkiran di kab.kukar;
- 26) Perlunya peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 27) Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan data bidang perhubungan.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Beberapa factor yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah:

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

- 1) Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Terbukanya peluang untuk menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan skala Kabupaten berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) perhubungan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Adanya Kebutuhan pembangunan perhubungan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Kutai Kartanegara;
- 5) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam RPJPD dan RPJMD Kab.Kutai Kartanegara;
- 6) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam Tatralok Kab.Kutai Kartanegara;
- 7) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan pembangunan di bidang perhubungan;
- 8) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak akademisi atau perguruan tinggi yang ada di daerah guna meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan;
- 9) Telah tersedianya Akses transportasi jalan darat yang telah menghubungkan sebagian besar wilayah Kabupaten;
- 10) Tersedianya akses transportasi sungai;
- 11) Potensi PAD sector perhubungan yang masih bisa dioptimalkan;
- 12) Terbukanya kesempatan kerjasama dengan pihak swasta dalam bidang jasa transportasi, misalnya dalam hal penyediaan Taxi Kota;
- 13) Adanya penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lembaga-lembaga pelatihan;
- 14) Ketersediaan alokasi dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Isu-isu penting yang akan ditangani dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021, yaitu:

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mentaati peraturan lalu lintas jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan;
- 2) Perlu ditingkatkannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara dari sektor perhubungan, yaitu melalui peningkatan retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir, retribusi tambat kapal, retribusi terminal, dan retribusi lainnya di bibiang perhubungan;
- 3) Perlu ditingkatkannya aplikasi teknologi informasi guna mendukung manajemen transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Diperlukan peningkatan kapasitas SDM perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Belum optimalnya system perencanaan guna memenuhi kebutuhan pembangunan di bidang perhubungan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 6) Perlunya peningkatan kinerja penyusunan perencanaan program dalam pengusulan program dan kegiatan pada APBD, APBD Provinsi serta APBN bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
- 7) Diperlukan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten guna ketepatan dalam proses penyediaan fasilitas lalu lintas yang sesuai kebutuhan;
- 8) Belum optimalnya fungsi Terminal dan pelayanan angkutan jalan guna menekan penggunaan kendaraan pribadi;
- 9) Lemahnya kinerja manajemen pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi di bidang perhubungan yang akurat guna

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

terpenuhinya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;

- 10) Menjaga akuntabilitas kinerja guna menghindari temuan hasil pemeriksaan;
- 11) Pemberian pelayanan masyarakat sesuai SPM agar meningkatkan kepuasan masyarakat;
- 12) Perlunya peningkatan pemahaman Aparatur tentang tugas pokok dan fungsi dan pembagian tugas yang jelas;
- 13) Perlunya sosialisasi keselamatan dan meningkatkan ketersediaan fasilitas lalu lintas guna membangun kesadaran masyarakat untuk pentingnya mentaati peraturan lalu lintas;
- 14) Pengoptimalan fungsi layanan pengujian kendaraan bermotor agar semakin terpenuhinya angkutan umum/ darat yang layak jalan dan ramah lingkungan.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dan Renstra pada tahun 2021

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, kemudian penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 2.5.1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
- 2.5.2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 x 12		14=13/5 x100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai	1) Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	1)Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis (Indikator RPMD)	83%		56%		56%												0%		0%	
			2)Prosentase Cakupan sarana dan prasarana perhubungan (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung)	94%		75%		75%										0%	-	0%	-	0%	0
		Pembangunan Dermaga (Pengada Ponton)	Jumlah Dermaga (Dermaga Apung)	5	2.624.838.818	2	1.850.000.000	0		-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	-	-	-	-	0	-	200%	1.850.000.000	40%	0,705
		Pengembangan dan Perluasan Lahan Parkir	Jumlah Lokasi lahan Parkir yang ditingkatkan/ dikembangkan (Unit)	2	3.000.000.000	0	0	0		-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	-	-	-	-	0	-	0%	-	0%	0,000
		Study Kajian Lingkungan Penggerakan Dermaga Wisata Pangembanne	Jumlah Dokumen	1	1.400.000.000,00	0	0	0		-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	-	-	-	-	0	-	0%	-	0%	0
		Kajian Peningkatan Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Dan Keterpaduan Sistem Transportasi Antar Moda/Multi Moda	Jumlah Dokumen	1	800.000.000,00	0	0	0		-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	-	-	-	-	0	-	0%	-	0%	0
		DED Pengrukan Alur Dermaga Wisata Pangempang	Jumlah Dokumen	1	1.500.000.000,00	0	0	0		-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	-	-	-	-	0	-	0%	-	0%	0
		DED Fasilitas Dan Akses Jalan Dalam Pelabuhan Umum Muara Badak Ilir	Jumlah Dokumen	1	800.000.000,00	0	0	0		-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	-	-	-	-	0	-	0%	-	0%	0
		Kajian Konektifitas Pembangunan Pelabuhan Untuk Mencapai Keeseimbangan Pembangunan Ekonomi Kab Kukar	Jumlah Dokumen	1	800.000.000,00	0	0	0		-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	-	-	-	-	0	-	0%	-	0%	0
		Kajian operasional manajemen lingkungan pelabuhan umum Muara Badak	Jumlah Dokumen	1	1.000.000.000,00	0	0	0		-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	-	-	-	-	0	-	0%	-	0%	0
		Amdal terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) Bongkar muat	Jumlah Dokumen	1	1.000.000.000,00	0	0	0		-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	-	-	-	-	0	-	0%	-	0%	0
		AMDAL pengerukan alur pelayaran pelabuhan umum Muara Badak	Jumlah Dokumen	1	1.100.000.000,00	0	0	0		-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	-	-	-	-	0	-	0%	-	0%	0

Pembangunan Dermaga Apung Desa Sepatin Kecamatan Anggana (Bankeu)	Jumlah Unit	1	2.000.000.000,00	0	0	0	-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	0%	0
Pembangunan Dermaga Apung Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai (Bankeu)	Jumlah Unit	1	1.000.000.000,00	0	0	0	-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	0%	0
DED Pembangunan Dermaga Wisata Pangempang	Jumlah Dokumen	1	500.000.000,00	0	0	0	-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	0%	0

Rata-rata capaian kinerja (%)

200%

Predikat kinerja

2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAI	1) Prosentase Jumlah Prasarana (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	82%	-	53%	53%											0%	-	53%	-	65%	#DIV/0!
	2) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAI (Traffic/ Warning Light, Rambu Lalin, Pagar Pengaman Jalan, dan Marka Jalan) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	58%		9%	13%											0%	-	9%	-	16%	#DIV/0!
	3) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAI (LPIU) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	25%		0%	0%											0%	-	0%	-	0%	#DIV/0!
	4)Prosentase Jumlah Fasilitas LLAI Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	71%		0%	0%											0%	-	0%	-	0%	#DIV/0!
	5) Prosentase Jumlah Alat Uji Kendaraan yang dilakukan Kalibrasi dan Berawat	100%		0%	100%											0%	-	0%	-	0%	#DIV/0!
	6) Prosentase Jumlah Prasarana (Gedung Kantor, Tempat Kerja/ Rumah Dinas) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	100%		50%	50%											-	-	50%	-	50%	#DIV/0!
Rehab Dermaga Kumala	Jumlah rehab dermaga	2	2.000.000.000	0	0	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
Rehab Dermaga Aji Imbut	Jumlah rehab dermaga	1	750.000.000	0	0	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
Rehab Dermaga Kutai Lama	Jumlah rehab dermaga	1	2.000.000.000	0	0	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
Rehab Dermaga Kecamatan Sebulu	Jumlah rehab dermaga	1	800.000.000	1	800.000.000	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	100%	800.000.000	100%	1
Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga	Jumlah rehab dermaga	2	200.000.000	5	1.350.000.000	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	500%	1.350.000.000	250%	6,75
Rehab Terminal Di Kecamatan Tenggaraong dan Kota Beneran	Jumlah Terminal	2	2.000.000.000	0	0	1	49.999.000	0%	-	3%	1.350.000					0%	1.350.000	0%	1.350.000	0%	0,000675
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah fasilitas LLAI	14	350.000.000	14	500.000.000	1	1.510.000.000	0%	-	7%	106.160.000	-	-	1	149.769.900	1	106.160.000	15	606.160.000	107%	1,73
Pemeliharaan Marka Jalan	Jumlah (M2)	800 M2	400.000.000	600 M2	300.000.000	0	486.976.836	0%	-	1%	3.930.000					0%	3.930.000	#VALUE!	303.930.000	#VALUE!	0,759825

Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Alat Uji, Pengujian	13	500.000.000	13	200.000.000	0	199.909.620	0%	-	0%	-	-	-	1	95.801.000	100%	-	1400%	200.000.000	108%	0,40
Rehabilitasi dan Pemeliharaan LPUJ	Jumlah unit	75	250.000.000	-	-	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rambu Laut (Rambu Suar)	Jumlah Rambu Suar yang di rehabilitasi	8	5.000.000.000	4	2.500.000.000	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehab Dan Pemeliharaan Rambu Laut (Rambu Suar)(Bankeu)	Jumlah Rambu Suar yang di rehabilitasi	2	1.500.000.000	-	-	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan prasarana balai/ gedung pengujian kendaraan bermotor	Jumlah unit	1	716.933.000	0	-	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
3) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1)Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata (sesuai RUPDA) (Indikator RUPMRA)	94%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2)Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan (menuju Bandara) (Indikator RUPMRA)	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	#DIV/0!
	3)Persentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (Rambu Lalu Lintas, Traffic/Warning Light, Pagar Pengaman Jalan, Marka Jalan) (Indikator RPJMD)	65%	-	21%	-	21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	21%	-	32%	#DIV/0!
	4)Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LPUJ)	57%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	#DIV/0!
	5)Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut)	97%	-	87%	-	87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	87%	-	90%	#DIV/0!
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata	Jumlah Rambu	20	1.000.000.000	15	1.000.000.000	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	1500%	1.000.000.000	75%	1
Monitoring , Pendataan dan Inventarisir Fasilitas Lalu Lintas di Kab. Kulur	Jumlah Dokumen	1	1.000.000.000	0	0	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
Pemetaan Rebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen	1	2.000.000.000	0	0	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
Pengecatan Marka Jalan Dan Pengadaan Serta Pemasangan Paku Jalan	Jumlah Fasilitas Lalu Lintas	2220 M2	2.750.000.000	1120 M2	1.500.000.000	0	417.268.768,00	0%	-	11%	47.185.000	-	-	-	-	0%	47.185.000	#VALUE!	1.547.185.000	#VALUE!	0,56261273
Pengadaan Perengkapan Jalan Dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Perengkapan jalan	444	2.400.000.000	454	2.500.000.000	200	3.234.428.500,00	0%	-	1%	42.682.400	-	-	-	-	0%	42.682.400	45400%	2.542.682.400	102%	1,059451
Pembangunan Rambu Suar	Jumlah unit	2	5.000.000.000	2	3.000.000.000	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	200%	3.000.000.000	100%	0,6

		Pengecatan Marka Jalan Dan Pengadaan Serta Pemasangan Paku Jalan (Banku)	Jumlah M3	1	4.500.000.000	0	0	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
		Pengadaan Perengkapan Jalan & Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (Banku)	Jumlah Perengkapan Jalan	1	2.000.000.000	0	0	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
		Lanjutan Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen	1	1.500.000.000	1	1.400.000.000	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	100%	1.400.000.000	100%	0,93
		Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light/ Warning Light	Jumlah Simpang	1	200.000.000	0	0	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
2	Meningkatkan Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	4) Program peningkatan pelayanan angkutan	1)Indikator RPJMD: Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.600		3.100		3.200										0%	-	310000%	-	86%	#DIV/0!
			2)Cakupan pelayanan angkutan sesuai SPM	63%		25%		38%										0%	-	25%	-	40%	#DIV/0!
			3)Rasio Ijin Trayek (Indikator RPJMD)	0,070%		0,061%		0,062%										0%	-	0%	-	87%	#DIV/0!
		Study Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab.Kukar	Jumlah Dokumen	1	700.000.000	0	0	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
		Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2017	Jumlah Kegiatan Penunjang WTN	1	600.000.000	1	199.147.263	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!		-	-	-	-	0%	-	100%	199.147.263	100%	0,33191211
		Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan parkir dalam rangka hari-hari besar, pekan daerah dan hari-hari tertentu lainnya di kab. Kukar	Jumlah Kegiatan Pengaturan dan Penataan	1	200.000.000	1	261.500.000	1	200.000.000	10%	19.195.000	34%	68.535.000	-	-	-	-	0%	68.535.000	100%	330.035.000	100%	1,650175
		Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Jumlah Kegiatan	1	200.000.000	1	17.458.400	1	200.000.000	6%	11.920.000	23%	46.576.000	-	-	-	-	0%	46.576.000	100%	64.034.400	100%	0,320172
		Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Pelayaran Angkutan sungai danau dan penyeberangan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	1	200.000.000	1	122.423.800	1	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	-	-	-	-	0%	-	100%	122.423.800	100%	0,612119
		Peningkatan dan Pengendalian Duplin Masyarakat terhadap keterlibatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah Kecamatan	1	500.000.000	1	299.850.000	1	250.000.000	7%	17.540.000	22%	55.389.000	-	-	-	-	0%	55.389.000	100%	355.239.000	100%	0,710478
		Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang Untuk Keselamatan Pelayaran di alur Pelayaran Kab. Kukar	Jumlah Kecamatan di Monitoring	1	200.000.000	0	0	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
		Monitoring dan Pengawasan TUKS serta Tersus di Wilayah Kab. Kukar		1	200.000.000	1	99.999.000	1	200.000.000	2%	4.550.000	15%	30.400.000	-	-	-	-	0%	30.400.000	100%	130.399.000	100%	0,651995

	Penyusunan rencana induk/ Masterplan penerapan sistem informasi teknologi bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen	1	1.200.000.000	0	0	1	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
5) Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1)Prosentase Jumlah kendaraan yang di uji terhadap jumlah kendaraan wajib diuji	100%		100%		100%											0%	-	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2)Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KUR) (Indikator RPJMD)	± 25 Menit / Kendaraan			± 25 Menit / Kendaraan		± 25 Menit / Kendaraan										-	-	#VALUE!	-	#VALUE!	#DIV/0!
	3)Jaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rata-Rata) (Indikator RPJMD)	Rp56.667		Rp56.667		Rp56.667											0%	-	5666700%	-	100%	#DIV/0!
	Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kasal.dll)	100%		100%		100%											0%	-	100%	-	100%	#DIV/0!
	Facilitasi Dan Koordinasi Forum lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Koordinasi dan sosialisasi	1	500.000.000	1	63.272.500	1	350.744.800	0%		18%	63.170.000										
	Pengadaan material PKB, Parkir, Peneng,Cat Semprot,Karcis dan retribusi tambat kapal	Buku uji, Peneng,Cat Semprot,Karcis dan Karcis retribusi tambat kapal	1	500.000.000	1	270.160.856	1	349.912.210	0%	0	3%	9.050.000	-	-	-	-	0%	9.050.000	100%	279.210.856	100%	0,56
	Pengadaan Mobil Uji Keliling	Jumlah Kendaraan	1	2.000.000.000	0	0	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian	1	2.500.000.000	0	0	1	2.410.000.000	0%	0	1%	13.284.000	-	-	-	-	0%	13.284.000	0%	13.284.000	0%	0,0053136
	Sosialisasi dan razia pelanggaran lalu lintas di jalan	Jumlah kegiatan	1	100.000.000	1	23.415.600	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-	-	-	-	0%	-	100%	23.415.600	100%	0,234156
	Penunjang Kegiatan Pelayanan Uji Keliling Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan	1	300.000.000	1	83.768.800	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-	-	-	-	0%	-	100%	83.768.800	100%	0,27922933
	Study kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen	1	800.000.000	1	740.834.000	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-	-	-	-	0%	-	100%	740.834.000	100%	0,9260425
	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB)	-	1	250.000.000	0	0	1	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
6) Program Peningkatan Pengembangan waktu Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanaan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuanaan	100%		100%		100%											0%	-	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inventarisasi BMD	Jumlah dokumen	5	1.000.000.000	1	141.808.000	2	329.999.800	14%	46.060.000	19%	63.276.800	-	-	-	-	-	63.276.800	100%	205.084.800	20%	0,2050848
		Jumlah dokumen	1	100.000.000	-	-	1	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0,00

		Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Bulan	12	581.349.620	1	566.253.620	1	294.460.000	0%	-	27%	78.760.000	-	-	-	-	0%	78.760.000	100%	645.013.620	8%	1,11
--	--	--	--------------	----	-------------	---	-------------	---	-------------	----	---	-----	------------	---	---	---	---	----	------------	------	-------------	----	------

Konsultasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	1	500.000.000	1	93.442.600	1	149.290.000	0%	-	16%	23.140.000	-	-	-	-	0%	23.140.000	100%	116.582.600	100%	0,23
Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah Kecamatan	12	500.000.000	0	0	12	250.000.000	0%	-	9%	21.937.000	-	-	-	-	0%	21.937.000	0%	21.937.000	0%	0,043874
7)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%		100%		100%										0%	-	100%	-	100%	#DIV/0!
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Materai/Perangko	1		0	0	0	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Rek. Telp, Spedy, Air & Listrik	180	3.662.166.939	36	575.935.864	36	9.165.911.608	28%	2.583.944.355	42%	3.887.355.786	-	-	-	-	36	6.471.300.141	72	7.047.236.005	40%	192,4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi	6	600.000.000	-	-	1	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	89.646.144	-	-	-	-	1	89.646.144	1	89.646.144	17%	14,9
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Cleaning Service	6	300.000.000	1	298.191.800	1	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	3.549.600	-	-	-	-	1	3.549.600	2	301.741.400	33%	100,6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6	178.860.000	1	117.815.000	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	9.100.000	-	-	-	-	0	9.100.000	100%	126.915.000	17%	71,0
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	6	200.000.000	1	179.500.000	1	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	1	-	2	179.500.000	33%	89,8
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	6	225.000.000	1	79.043.200	1	131.120.000	0%	0	7%	9.364.600	-	-	-	-	1	9.364.600	2	88.407.800	33%	39,3
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	rupa rupa alat listrik dan elektronik	4	80.000.000	1	47.150.000	1	32.217.000	0%	-	22%	7.000.000	-	-	-	-	1	7.000.000	2	54.150.000	50%	67,7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat kabar dan Majalah	6	40.000.000	-	-	1	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	1.770.000	-	-	-	-	1	1.770.000	1	1.770.000	17%	4,4
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Nasi Kotak, Snack, air mineral dan minuman kaleng	6	150.000.000	1	100.610.000	1	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	3.012.000	-	-	-	-	1	3.012.000	2	103.622.000	33%	69,1
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	6	1.600.000.000	1	378.096.541	1	560.591.000	16%	87.480.800	25%	141.435.800	-	-	-	-	1	141.435.800	2	519.532.341	33%	32,5
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran/ jasa THTL	6	2.634.740.160	1	3.274.915.144	1	4.641.091.648	20%	911.689.788	33%	1.523.279.608	-	-	-	-	1	1.523.279.608	2	4.798.194.752	33%	182,1
Penyediaan Bahan-Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	4	100.000.000	-	-	1	386.538.220	0%	0	6%	22.269.000	-	-	-	-	1	22.269.000	1	22.269.000	25%	22,3
							-									0	-	-	-	#DIV/0!	
							-									0	-	-	-	#DIV/0!	
																1	-	2	-	200%	
8) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%		100%										1	-	2	-	200%	
Pengadaan peralatan gedung	Jumlah Kegiatan Peralatan Gedung	1	1.111.318.489	1	1.071.963.880	1	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	1	-	2	1.071.963.880	200%	96,5
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Kegiatan Perlengkapan Gedung	1	763.318.500	1	675.319.826	1	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	1	-	2	675.319.826	200%	88,5
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan	5	1.111.318.489	1	15.298.500	1	137.230.000	0%	0	10%	14.310.000	-	-	-	-	1	14.310.000	2	29.608.500	40%	2,7
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan	1	880.000.000	1	802.604.464	1	149.627.000,00	0%	0	0%	0	-	-	-	-	1	-	2	802.604.464	200%	91,2
Pengembangan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1	8.000.000.000	1	4.555.895.240	1	-	0%	0	0%	0	-	-	-	-	1	-	2	4.555.895.240	200%	56,9

[illegible]

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
1	1)Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis (<i>Indikator RPJMD</i>)			83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	
2	2)Prosentase Cakupan sarana dan prasarana perhubungan (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung)			87%	87%	90%	90%	94%	94%	90%	90%	94%	94%	
3	1) Prosentase Jumlah Prasarana (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			53%	53%	65%	65%	82%	82%	65%	65%	82%	82%	
4	2) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (Traffic/ Warning Light, Rambu Lalin, Pagar Pengaman Jalan, dan Marka Jalan) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			9%	13%	34%	34%	58%	58%	34%	34%	58%	58%	
5	3) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (LPJU) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			0%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
6	4)Prosentase Jumlah Fasilitas LLA Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			0%	0%	36%	36%	71%	71%	36%	36%	71%	71%	
7	5) Prosentase Jumlah Alat Uji Kendaraan yang dilakukan Kalibrasi dan Perawatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	6) Prosentase Jumlah Prasarana (Gedung Kantor, Tempat Kerja/ Rumah Dinas) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	1)Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata (sesuai RPPDA) (<i>Indikator RPJMD</i>)			0%	0%	63%	63%	94%	94%	63%	63%	94%	94%	

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra				Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)			Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
10	2) Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (menuju Bandara) (Indikator RPJMD)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
11	3) Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (Rambu Lalu Lintas, Traffic/Warning Light, Pagar Pengaman Jalan, Marka Jalan) (Indikator RPJMD)			21%	21%	44%	44%	65%	65%	44%	44%	65%	65%	
12	4) Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LPJU)			0%	0%	29%	29%	57%	57%	29%	29%	57%	57%	
13	5) Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut)			87%	87%	93%	93%	97%	97%	93%	93%	97%	97%	
14	1) Indikator RPJMD: Jumlah arus penumpang angkutan umum			3100	3200	3300	3300	3400	3400	3300	3300	3400	3400	
15	2) Cakupan pelayanan angkutan sesuai SPM			25%	38%	50%	50%	63%	63%	50%	50%	63%	63%	
16	3) Rasio Ijin Trayek (Indikator RPJMD)			0,061%	0,062%	0,064%	0,064%	0,066%	0,066%	0,064%	0,064%	0,066%	0,066%	
17	1) Prosentase jumlah kendaraan yang di uji terhadap jumlah kendaraan wajib diuji			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	2) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Indikator RPJMD)			± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	
19	3) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rata-Rata) (Indikator RPJMD)			56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	
20	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Cakupan layanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
23	Tingkat kepatuhan aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			72%	72%	78%	78%	85%	85%	78%	78%	85%	85%	

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra				Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)			Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
25	Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal, dll)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA		1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	80 (A)	30.383.831.469,00		1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	80	30.383.831.469,00	
			2. Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan	78%			2. Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan	78		
			3. Ideks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 (Baik)			3. Ideks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100	329.999.800,00		Prosentase Konsistensi Renstra Dan Renja	100	329.999.800,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	2 dokumen	200.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perncaanaan	6 dokumen	200.000.000,00	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	129.999.800,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	129.999.800,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	100	13.827.665.593,00		Prosentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset	100	13.827.665.593,00	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN	325 orang/bulan	13.533.205.593,00	Tenggarong	Jumlah ASN	325 orang/bulan	13.533.205.593,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran	Tenggarong	Jumlah ASN	10 orang/Bulan	194.460.000,00	Tenggarong	Jumlah ASN	10 orang/Bulan	194.460.000,00	
	Kordinasi Dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Kukar	Jumlah Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen	2 dokumen	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen	2 dokumen	100.000.000,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	100	149.290.000,00		Prosentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset	100	149.290.000,00	
	Pengamanan barang milik daerah SKPD	kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	149.290.000,00	kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	149.290.000,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	0,5	350.000.000,00		Prosentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	0,5	350.000.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Jumlah Dokumern	2 dokumen	50.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumern	2 dokumen	50.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi	kukar	Jumlah Lokasi	5 Kecamatan	50.000.000,00	kukar	Jumlah Lokasi	5	50.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kukar	Jumlah Tim peserta dan	20 orang	100.000.000,00	kukar	Jumlah Tim peserta dan	20 orang	100.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah pesrta	2 orang kegiatan	150.000.000,00	Tenggarong	Jumlah pesrta	2 orang kegiatan	150.000.000,00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	1.283.666.220,00		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	1.283.666.220,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah Komponen dan Instalasi Listrik	1 paket	32.217.000,00	Tenggarong	Jumlah Komponen dan Instalasi Listrik	1 paket	32.217.000,00	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	-	Tenggarong	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Barang ATK, Jumlah Kegiatan dan Jumlah ASN	1 paketi, 35 orang kali/kegiatan, 3570 kotak	386.538.220,00	Tenggarong	Jumlah Barang ATK dan Jumlah ASN	54 jenis barang	386.538.220,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tenggarong	Jumlah Barang Cetak dan Jumlahj dokumen Pengandaan	1 Paket, 15000 lembar, 2000 pak	131.120.000,00	Tenggarong	Jumlah Barang Cetak dan Jumlahj dokumen Pengandaan	2 Paket	131.120.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	Jumlah ASN	35 orang/kali	560.591.000,00	Kukar	Jumlah ASN	35 orang/kali	560.591.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 kegiatan	98.100.000,00	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 kegiatan	98.100.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah website dan aplikasi	1 paket	75.100.000,00	Tenggarong	Jumlah website dan aplikasi	1 paket	75.100.000,00	
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan pengadaan barang	100	-		Cakupan pengadaan barang	100	-	
	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah mebel yang di adakan	1 paket		Tenggarong	Jumlah mebel yang di adakan	1 paket		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	13.807.003.256,00		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	13.807.003.256,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah rekening tagihan	5 kegiatan	9.165.911.608,00	Tenggarong	Jumlah rekening tagihan	5 kegiatan	9.165.911.608,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Terciptanya kebersihan kantor dan terpenuhi jasa administrasi perkantoran	12 bulan	4.641.091.648,00	Tenggarong	Terciptanya kebersihan kantor dan terpenuhi jasa administrasi perkantoran	12 bulan	4.641.091.648,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	100	636.206.600,00		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam kondisi Baik	100	636.206.600,00	

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas jabatan	5 unit	174.667.300,00	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas jabatan	5 unit	174.667.300,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah kendaraan operasional	12 unit	174.682.300,00	Tenggarong	Jumlah kendaraan operasional	12 unit	174.682.300,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah peralatan dan mesin	167 unit	137.230.000,00	Tenggarong	Jumlah peralatan dan mesin	167 unit	137.230.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung/bangunan	1 paket	149.627.000,00	Tenggarong	Jumlah gedung/bangunan	1 paket	149.627.000,00	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	7.299.234.734,00		Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	9.709.234.734,00	
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	5.231.405.336,00		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	5.231.405.336,00	
	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	kukar	Jumlah LPJU yang dipasang	140 unit	3.234.428.500,00	kukar	Jumlah LPJU yang dipasang	140 unit	3.234.428.500,00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perlengkapan jalan yang disediakan	1 paket						
	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	kukar	Jumlah LPJU dipelihara	700 unit	1.510.000.000,00	kukar	Jumlah LPJU dipelihara	700 unit	1.510.000.000,00	

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	kukar	Jumlah Rambu, marka dan trafig light	400 m2 dan 208 unit	486.976.836,00	kukar	Jumlah Rambu, marka dan trafig light	400 m2 dan 208 unit	486.976.836,00	
10	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	49.999.000,00		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	49.999.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Tenggarong	Jumlah terminal yang dipelihara	2 lokasi	49.999.000,00	Tenggarong	Jumlah terminal yang dipelihara	2 lokasi	49.999.000,00	
11	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	200.000.000,00		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	200.000.000,00	
	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota		Jumlah Lahan Parkir	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	kukar	Jumlah lokasi parkir	16 Kecamatan	200.000.000,00	kukar	Jumlah lokasi parkir	16 Kecamatan	200.000.000,00	
12	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	100	599.816.830,00		Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	100	3.009.816.830,00	
	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor dan SIM PKB	4 unit	-	Tenggarong	Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor dan SIM PKB	4 unit	2.410.000.000,00	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah lokasi	4 Kecamatan	49.995.000,00	Tenggarong	Jumlah lokasi	4 Kecamatan	49.995.000,00	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah simcard	10.200 unit	349.912.210,00	Tenggarong	Jumlah simcard	10.200 unit	349.912.210,00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah alat pengujian	25 unit	199.909.620,00	Tenggarong	Jumlah alat pengujian	25 unit	199.909.620,00	

13	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	100	1.218.013.568,00		Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	100	1.218.013.568,00	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	kukar	Jumlah lokasi	15 kecamatan	250.000.000,00	kukar	Jumlah lokasi	15 kecamatan	250.000.000,00	
	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	kukar	Jumlah rambu yang dipasang	150 unit	417.268.768,00	kukar	Jumlah rambu yang dipasang	150 unit	417.268.768,00	
	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	kukar	Jumlah lokasi	10 kecamatan	200.000.000,00	kukar	Jumlah lokasi	10 kecamatan	200.000.000,00	
	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	kukar	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan	350.744.800,00	kukar	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan	350.744.800,00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	848.511.847,00		Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	848.511.847,00	
14	Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	200.000.000,00		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	200.000.000,00	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut	kukar	Jumlah tempat usaha	6 kecamatan	200.000.000,00	kukar	Jumlah tempat usaha	6 kecamatan	200.000.000,00	
15	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	349.987.820,00		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	349.987.820,00	

	Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	Desa Sepatin Kec. Anggana dan Desa Saliki Kec. Ma.Badak	Jumlah Dermaga	2 unit	349.987.820,00	Desa Sepatin Kec. Anggana dan Desa Saliki Kec. Ma.Badak	Jumlah Palabuhan Pengumpan lokal	2 unit	349.987.820,00	
16	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	298.524.027,00		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	298.524.027,00	
	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Kec. Ma. Muntai dan Kec. Kembang Jangut	Jumlah pelabuhan/dermaga	2 paket	199.359.027,00	Kec. Ma. Muntai dan Kec. Kembang Jangut	Jumlah pelabuhan/dermaga	2 paket	199.359.027,00	
	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	kukar	Jumlah lokasi	6 kecamatan	99.165.000,00	kukar	Jumlah lokasi	6 kecamatan	99.165.000,00	
	Jumlah				38.531.578.050,00				40.941.578.050,00	

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

No	Urusan, Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Bobot Kinerja / Target Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kab.Kukar	Persentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	84%	
1	Rehab Berat Dermaga Nelayan Muara Badak	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1	Usulan Musrenbang
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kab.Kukar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	94%	
2	Pembangunan Pelabuhan Umum Desa Muara Badak Ilir		Jumah Pelabuhan Laut	1 Unit	Usulan Musrenbang
3	Pembangunan Dermaga		Jumlah Dermaga (Dermaga)	3 Unit	
	Pengadaan Dermaga Ponton	DESA - TELUK MUDA	Jumlah Dermaga (Dermaga)	1 Unit	Usulan Musrenbang
	Pembangunan Dermaga Dusun Delta Mahakam	DESA - MUARA KAMAN ULU	Jumlah Dermaga (Dermaga)	1 Unit	Usulan Musrenbang
	Pembangunan Dermaga Wisata Danau	DESA -	Jumlah Dermaga	1 Unit	Usulan Musrenbang
VIII	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Kab.Kukar	Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	85%	
4	Pengadaan Perlengkapan Jalan Dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan		Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	1 Kegiatan	
	Pengadaan Rambu Jembatan Martadipura Kota Bangun	DESA - KOTA BANGUN ULU	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	1 Kegiatan	Usulan Musrenbang
5	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		Jumlah LPJU (Unit)	4Kegiatan	
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan dan Jembatan Martadipura	DESA - KOTA BANGUN ULU	Jumlah LPJU (Unit)	1 Kegiatan	Usulan Musrenbang
	Pengadaan dan pemasangan lpju kel. Maluhu		Jumlah LPJU (Unit)	1 Kegiatan	Usulan Musrenbang
	Pembangunan Penerangan Jalan Umum PJU Desa Liang Buaya	DESA - LIANG BUAYA	Jumlah LPJU (Unit)	1 Kegiatan	Usulan Musrenbang
	Lampu Penerangan Jalan (2.6 Km/62 Titik)	DESA - LEBAHO ULAQ	Jumlah LPJU (Unit)	1 Kegiatan	Usulan Musrenbang
6	Normalisasi Alur Danau Melintang	DESA - MUARA ENGELAM		1 Kegiatan	Usulan Musrenbang

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk menangani isu-isu strategis yang telah ditentukan tersebut akan dirumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan
- 2) Tujuan 1: Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah
- 3) Tujuan 2: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan

Kemudian Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah yang hendak dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran dari Tujuan 1: Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan;
 - b) Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan; dan
 - c) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 2) Sasaran dari Tujuan 2: Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
- 3) Sasaran dari Tujuan 3: Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Prosentase Penunjang Peningkatan Penerimaan PAD Bidang Perhubungan; dan

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

b) Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji.

Untuk lebih jelasnya mengenai Sasaran-Sasaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	2	3		4	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1	Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
				2	Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah	2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
3	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	3	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan	1	Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan
				2	Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana Pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2021 dituangkan ke dalam Program sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulan/semesteran

Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Pengamanan barang milik daerah SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Kordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota

Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PKB

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas

Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota

Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin

Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit

Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Terminal

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan

Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi

Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem

Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan

Umum

Penetapan Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah kabupaten / Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota

Program Pengelolaan Pelayaran

Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/kota

Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai Dan Danau

Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal

Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal

Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal

Pengawasan pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Pembangunan pelabuhan sungai dan danau

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau
Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau

Untuk usulan rencana kegiatan Perubahan tahun 2021 di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat dalam daftar/matrik rencana kerja Perubahan (Renja) tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Kertas Kerja Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2021

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

**MATRIK PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	RENJA TAHUN 2021				APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				SELISIH ANTARA PAGU APBD 2021 DENGAN USULAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =(14-10)	16
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA		1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan 2. Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan 3. Ideks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 (A) 78% 77 (Baik)	30.383.831.469,00		1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan 2. Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan 3. Ideks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 78 77	30.383.831.469,00		1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan 2. Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan 3. Ideks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 (A) 78% 77 (Baik)	66.347.574.952,00	35.963.743.483,00	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100	329.999.800,00		Prosentase Konsistensi Renstra Dan Renja	100	329.999.800,00		Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100	414.773.039,00	84.773.239,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	2 dokumen	200.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perncaanaan	6 dokumen	200.000.000,00	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	3 dokumen	260.396.439,00	60.396.439,00	Penambahan pagu untuk penyusunan dok IKM dan Honor tenaga Ahli penyusunan dok renstra
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	129.999.800,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	129.999.800,00	Tenggarong	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	154.376.600,00	24.376.800,00	Penambahan pagu untuk honor pendamping penyusunan dok SPIP
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	100	13.827.665.593,00		Prosentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset	100	13.827.665.593,00		Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	100	49.509.396.985,00	35.681.731.392,00	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN	325 orang/bulan	13.533.205.593,00	Tenggarong	Jumlah ASN	325 orang/bulan	13.533.205.593,00	Tenggarong	Jumlah ASN	325 orang/bulan	14.965.330.435,00	1.432.124.842,00	Penambahan Pagu TPP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporann Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran	Tenggarong	Jumlah ASN	10 orang/Bulan	194.460.000,00	Tenggarong	Jumlah ASN	10 orang/Bulan	194.460.000,00	Tenggarong	Jumlah ASN	10 orang/Bulan	34.233.416.550,00	34.038.956.550,00	Penambahan pagu honor KPA kegiatan Bankeu
	Kordinasi Dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Kukar	Jumlah Kegiatan	-	-	-	-	-	-	kukar	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	210.650.000,00	210.650.000,00	Pembayaran utang
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen	2 dokumen	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen	2 dokumen	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen	2 dokumen	100.000.000,00	-	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	100	149.290.000,00		Prosentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset	100	149.290.000,00		Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	100	155.370.000,00	6.080.000,00	
	Pengamanan barang milik daerah SKPD	kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	149.290.000,00	kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	149.290.000,00	kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	155.370.000,00	6.080.000,00	penambahan pagu
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	0,5	350.000.000,00		Prosentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	0,5	350.000.000,00		Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	0,5	376.582.000,00	26.582.000,00	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Jumlah Dokumern	2 dokumen	50.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumern	2 dokumen	50.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumern	2 dokumen	50.000.000,00	-	
	Monitoring, Evaluasi	kukar	Jumlah Lokasi	5 Kecamatan	50.000.000,00	kukar	Jumlah Lokasi	5 Kecamatan	50.000.000,00	kukar	Jumlah Lokasi	5 Kecamatan	50.000.000,00	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kukar	Jumlah Tim peserta dan	20 orang	100.000.000,00	kukar	Jumlah Tim peserta dan	20 orang	100.000.000,00	kukar	Jumlah Tim peserta dan	20 orang	126.582.000,00	26.582.000,00	Penambahan pagu
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah pesrta	2 orang kegiatan	150.000.000,00	Tenggarong	Jumlah pesrta	2 orang kegiatan	150.000.000,00	Tenggarong	Jumlah pesrta	2 orang kegiatan	150.000.000,00	-	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	1.283.666.220,00		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	1.283.666.220,00		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	1.514.360.220,00	230.694.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah Komponen dan Instalasi Listrik	1 paket	32.217.000,00	Tenggarong	Jumlah Komponen dan Instalasi Listrik	1 paket	32.217.000,00	Tenggarong	Jumlah Komponen dan Instalasi Listrik	1 paket	32.217.000,00	-	Penambahan Pagu
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	-	Tenggarong	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	Tenggarong	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	235.999.000,00	400.000.000,00	Sub Kegiatan Baru
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Barang ATK, Jumlah Kegiatan dan Jumlah ASN	1 paketi, 35 orang kali/kegiatan, 3570 kotak	386.538.220,00	Tenggarong	Jumlah Barang ATK dan Jumlah ASN	54 jenis barang	386.538.220,00	Tenggarong	Jumlah Barang ATK, Jumlah Kegiatan dan Jumlah ASN	1 paketi, 35 orang kali/kegiatan, 3570 kotak	374.233.220,00	(12.305.000,00)	Pengurangan Pagu
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tenggarong	Jumlah Barang Cetakan dan Jumlahj dokumen Penggandaan	1 Paket, 15000 lembar, 2000 pak	131.120.000,00	Tenggarong	Jumlah Barang Cetakan dan Jumlahj dokumen Penggandaan	2 Paket	131.120.000,00	Tenggarong	Jumlah Barang Cetakan dan Jumlahj dokumen Penggandaan	1 Paket, 15000 lembar, 2000 pak	115.200.000,00	(15.920.000,00)	Pengurangan Pagu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	Jumlah ASN	35 orang/kali	560.591.000,00	Kukar	Jumlah ASN	35 orang/kali	560.591.000,00	Kukar	Jumlah ASN	35 orang/kali	568.751.000,00	8.160.000,00	Penambahan Pagu
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 kegiatan	98.100.000,00	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 kegiatan	98.100.000,00	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 kegiatan	112.860.000,00	14.760.000,00	Penambahan Pagu
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah website dan aplikasi	1 paket	75.100.000,00	Tenggarong	Jumlah website dan aplikasi	1 paket	75.100.000,00	Tenggarong	Jumlah website dan aplikasi	1 paket	75.100.000,00	-	
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan pengadaan barang	100	-		Cakupan pengadaan barang	100	-		Cakupan pengadaan barang	100	99.640.000,00	99.640.000,00	Kegiatan Baru
	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah mebel yang di adakan	1 paket		Tenggarong	Jumlah mebel yang di adakan	1 paket		Tenggarong	Jumlah mebel yang di adakan	1 paket	99.640.000,00	99.640.000,00	Sub Keg Baru penambahan mebel digedung ktr yanga baru
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	13.807.003.256,00		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	13.807.003.256,00		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	13.355.748.108,00	(451.255.148,00)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah rekening tagihan	5 kegiatan	9.165.911.608,00	Tenggarong	Jumlah rekening tagihan	5 kegiatan	9.165.911.608,00	Tenggarong	Jumlah rekening tagihan	5 kegiatan	8.694.696.460,00	(471.215.148,00)	Pengurangan Pagu/Penghem atan listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Terciptanya kebersihan kantor dan terpenuhi jasa administrasi perkantoran	12 bulan	4.641.091.648,00	Tenggarong	Terciptanya kebersihan kantor dan terpenuhi jasa administrasi perkantoran	12 bulan	4.641.091.648,00	Tenggarong	Terciptanya kebersihan kantor dan terpenuhi jasa administrasi perkantoran	12 bulan	4.661.051.648,00	19.960.000,00	Pengurangan Pagu/THL yg berhenti
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	100	636.206.600,00		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam kondisi Baik	100	636.206.600,00		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	100	921.704.600,00	285.498.000,00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas jabatan	5 unit	174.667.300,00	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas jabatan	5 unit	174.667.300,00	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas jabatan	5 unit	174.667.300,00	-	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah kendaraan operasional	12 unit	174.682.300,00	Tenggarong	Jumlah kendaraan operasional	12 unit	174.682.300,00	Tenggarong	Jumlah kendaraan operasional	12 unit	288.932.300,00	114.250.000,00	Optimalisasi Kendaraan operasional (Penambahan pagu)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah peralatan dan mesin	167 unit	137.230.000,00	Tenggarong	Jumlah peralatan dan mesin	167 unit	137.230.000,00	Tenggarong	Jumlah peralatan dan mesin	167 unit	136.050.000,00	(1.180.000,00)	Pengurangan Pagu
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Tenggarong	Jumlah Gedung/bangunan	12 paket	-	Tenggarong	Jumlah gedung/bangunan	1 paket	-	Tenggarong	Jumlah gedung/bangunan	1 paket	244.550.000,00	244.550.000,00	SubKegiatan Baru
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung/bangunan	1 paket	149.627.000,00	Tenggarong	Jumlah gedung/bangunan	1 paket	149.627.000,00	Tenggarong	Jumlah gedung/bangunan	1 paket	77.505.000,00	(72.122.000,00)	Pengurangan Pagu
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	6.748.489.934,00		Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	9.158.489.934,00		Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	9.534.044.437,00	375.554.503,00	
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	5.231.405.336,00		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	5.231.405.336,00		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	5.344.685.335,00	113.279.999,00	
	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	kukar	Jumlah LPJU yang dipasang	140 unit	3.234.428.500,00	kukar	Jumlah LPJU yang dipasang	140 unit	3.234.428.500,00	Kukar	Jumlah LPJU yang dipasang	140 unit	3.347.708.499,00	113.279.999,00	Sisa pagu hasil HPS Rp.580.535.000 akan di belanjakan material LPJU (sisa HPS)
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perlengkapan jalan yang disediakan	1 paket						Kukar	Jumlah Perlengkapan jalan yang disediakan	1 paket		-	
	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	kukar	Jumlah LPJU dipelihara	700 unit	1.510.000.000,00	kukar	Jumlah LPJU dipelihara	700 unit	1.510.000.000,00	kukar	Jumlah LPJU dipelihara	700 unit	1.510.000.000,00	-	Penambahan ornamen jaringan LPJU dan pembuatan jalur senda
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	kukar	Jumlah Rambu, marka dan trafif light	400 m2 dan 208 unit	486.976.836,00	kukar	Jumlah Rambu, marka dan trafif light	400 m2 dan 208 unit	486.976.836,00	kukar	Jumlah Rambu, marka dan trafif light	400 m2 dan 208 unit	486.976.836,00	-	
10	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	49.999.000,00		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	49.999.000,00		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	49.999.000,00	-	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Tenggarong	Jumlah terminal yang dipelihara	2 lokasi	49.999.000,00	Tenggarong	Jumlah terminal yang dipelihara	2 lokasi	49.999.000,00	Tenggarong	Jumlah terminal yang dipelihara	2 lokasi	49.999.000,00	-	
11	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	200.000.000,00		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	200.000.000,00		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	200.000.000,00	-	
	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota		Jumlah Lahan Parkir	-	-	-	-	-	-	-	Jumlah Lahan Parkir	1 Lokasi	-	-	Sub Kegiatan Baru
	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	kukar	Jumlah lokasi parkir	16 Kecamatan	200.000.000,00	kukar	Jumlah lokasi parkir	16 Kecamatan	200.000.000,00	kukar	Jumlah lokasi parkir	16 Kecamatan	200.000.000,00	-	
12	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	100	599.816.830,00		Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	100	3.009.816.830,00		Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	100	3.118.757.337,00	108.940.507,00	

	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor dan SIM PKB	4 unit	-	Tenggarong	Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor dan SIM PKB	4 unit	2.410.000.000,00	Tenggarong	Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor dan SIM PKB	3 unit	2.455.302.647,00	45.302.647,00	pengurangan Pagu / sisa HPS
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah lokasi	4 Kecamatan	49.995.000,00	Tenggarong	Jumlah lokasi	4 Kecamatan	49.995.000,00	Tenggarong	Jumlah lokasi	4 Kecamatan	49.995.000,00	-	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah simcard	10.200 unit	349.912.210,00	Tenggarong	Jumlah simcard	10.200 unit	349.912.210,00	Tenggarong	Jumlah simcard	10.200 unit	349.912.210,00	-	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah alat pengujian	25 unit	199.909.620,00	Tenggarong	Jumlah alat pengujian	25 unit	199.909.620,00	Tenggarong	Jumlah alat pengujian	25 unit	263.547.480,00	63.637.860,00	
13	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	100	667.268.768,00		Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	100	667.268.768,00		Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	100	820.602.765,00	153.333.997,00	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	kukar	Jumlah lokasi	15 kecamatan	250.000.000,00	kukar	Jumlah lokasi	15 kecamatan	250.000.000,00	kukar	Jumlah lokasi	15 kecamatan	250.000.000,00	-	
	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	kukar	Jumlah rambu yang dipasang	150 unit	417.268.768,00	kukar	Jumlah rambu yang dipasang	150 unit	417.268.768,00	kukar	Jumlah rambu yang dipasang	150 unit	570.602.765,00	153.333.997,00	Penamahan Pagu dari Sisa Pagu HPS penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten

	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	kukar	Jumlah lokasi	10 kecamatan	200.000.000,00	kukar	Jumlah lokasi	10 kecamatan	200.000.000,00	kukar	Jumlah lokasi	10 kecamatan	200.000.000,00	-	
	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	kukar	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan	350.744.800,00	kukar	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan	350.744.800,00	kukar	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan	350.744.800,00	-	
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Presentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	848.511.847,00		Presentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	848.511.847,00		Presentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	18.874.755.253,00	18.026.243.406,00	
14	Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas		Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	200.000.000,00		Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	200.000.000,00		Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	200.000.000,00	-	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut	kukar	Jumlah tempat usaha	6 kecamatan	200.000.000,00	kukar	Jumlah tempat usaha	6 kecamatan	200.000.000,00	kukar	Jumlah tempat usaha	6 kecamatan	200.000.000,00	-	
15	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal		Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	349.987.820,00		Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	349.987.820,00		Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	349.987.820,00	-	
	Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	Desa Sepatin Kec. Anggana dan Desa Saliki Kec. Ma Badak	Jumlah Dermaga	2 unit	349.987.820,00	Desa Sepatin Kec. Anggana dan Desa Saliki Kec.	Jumlah Pelabuhan Pengumpan lokal	2 unit	349.987.820,00	Desa Sepatin Kec. Anggana dan Desa Saliki Kec. Ma Badak	Jumlah Dermaga	2 unit	349.987.820,00	-	
16	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	298.524.027,00		Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	298.524.027,00		Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	18.324.767.433,00	18.026.243.406,00	
	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau		Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	1 Unit	-	Kec. Muara Badak	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	1 Unit	-	Kec. Muara Badak	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	1 unit	17.999.408.406,00		Banku
	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Kec. Ma. Muntai dan Kec. Kembang Jangut	Jumlah pelabuhan/dermaga	2 paket	199.359.027,00	Kec. Ma. Muntai dan Kec. Kembang Jangut	Jumlah pelabuhan/dermaga	2 paket	199.359.027,00	Kec. Ma. Muntai dan Kec. Kembang Jangut	Jumlah pelabuhan/dermaga	2 paket	199.359.027,00	-	
	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	kukar	Jumlah lokasi	6 kecamatan	99.165.000,00	kukar	Jumlah lokasi	6 kecamatan	99.165.000,00	kukar	Jumlah lokasi	6 kecamatan	126.000.000,00	26.835.000,00	Pencapaian target (Penambahan Pasir)
	Jumlah				38.531.578.050,00				40.941.578.050,00				95.307.119.442,00	(54.365.541.392,00)	

Tenggarong, Juli 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

H. HELDIANSYAH, SH., MH
Pembina Utama Muda
Np. 19660810 198902 1 002



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu pada tahun anggaran 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) dimaksudkan untuk merencanakan dan memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan, dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan tahun 2021 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan Pemerintahan *GOOD GOVERNANCE* and *CLEAN GOVERNMENT* dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, yang sejalan dan sesuai kebutuhan. Dan mewujudkan pelayanan transportasi yang tertib, lancar, aman, nyaman serta harga terjangkau dalam rangka membuka isolasi daerah dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan program Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2016-2021).

Lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (Permendagri 86/2017, pasal 343) :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, Kerangka ekonomi Daerah, rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

BAB IV. Penutup

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodasi hasil pengendalian dan evaluasi serta hasil audit laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 oleh BPK.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2021 disusun dalam rangka sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan di bidang perhubungan tahun 2021, serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder di lingkungan Dinas Perhubungan. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bersama Sekretaris beserta Seluruh Kepala Bidang dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Perhubungan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Berkewajiban menjaga konsistensi antara RENJA dengan RENSTRA Dinas Perhubungan;
3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan RENJA Perubahan Dinas Perhubungan 2021, masing-masing Bidang, Kepala Seksi dan UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan RENJA Tahun 2021.

Tenggarong, Juli 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara



H. Heldiansyah, SH., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660810 198902 1 003

BAB IV. Penutup

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021*